



# BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 8, Mei 2022

## **Menilik Potensi dan Tantangan Logam Tanah Jarang Nasional**

*p.3*

## **Upaya dan Tantangan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Rasio Kewirausahaan di Indonesia**

*p.7*

## **Target Pemerintah Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada 2022**

*p.12*

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

**Penanggung Jawab**  
Drs. Helmizar, M.E.

**Pemimpin Redaksi**  
Robby Alexander Sirait

**Redaktur**  
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri

Martha Carolina  
Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

**Editor**  
Nadya Ahda

## Menilik Potensi dan Tantangan Logam Tanah Jarang Nasional

p.3

*Logam Tanah Jarang (LTJ) menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga di Indonesia. Pengembangan LTJ menjadi penting mengingat LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai industri elektronik, industri otomotif, industri pertahanan, serta dapat digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Tiongkok sebagai penghasil utama LTJ dunia mengurangi pasokan yang menyebabkan melambungnya harga LTJ. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi lokasi pilihan bagi importir ataupun investor dari berbagai negara dalam mengembangkan komoditas LTJ. Mengingat potensi LTJ di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan penyusunan roadmap LTJ, persiapan offtaker dalam negeri, mengontrol aktivitas penambang ilegal, serta perlu adanya regulasi yang mengatur penambangan LTJ.*

p.7

## Upaya dan Tantangan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Rasio Kewirausahaan di Indonesia

*Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia.*

## Target Pemerintah Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada 2022

p.12

*Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh dengan ketidakpastian.*

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

# Menilik Potensi dan Tantangan Logam Tanah Jarang Nasional

Rosalina Tineke Kusumawardhani\*)

## Abstrak

Logam Tanah Jarang (LTJ) menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga di Indonesia. Pengembangan LTJ menjadi penting mengingat LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai industri elektronik, industri otomotif, industri pertahanan, serta dapat digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Tiongkok sebagai penghasil utama LTJ dunia mengurangi pasokan yang menyebabkan melambungnya harga LTJ. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi lokasi pilihan bagi importir ataupun investor dari berbagai negara dalam mengembangkan komoditas LTJ. Mengingat potensi LTJ di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan penyusunan roadmap LTJ, persiapan offtaker dalam negeri, mengontrol aktivitas penambang ilegal, serta perlu adanya regulasi yang mengatur penambangan LTJ.

LTJ atau *Rare Earth Element* menjadi salah satu komoditas yang dianggap berharga dan mulai menjadi incaran berbagai negara. Sebagai gambaran, LTJ diperoleh dari pertambangan timah yang menghasilkan monasit. Jenis ini paling memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sejumlah produk. Sebagian besar produk yang berteknologi tinggi, mulai dari *handphone*, televisi, mobil hibrida, hingga perangkat pemandu rudal nuklir yang bersifat *green energy* sangat membutuhkan LTJ. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan *roadmap* untuk pengembangan LTJ.

Pengembangan LTJ menjadi penting karena menurut laporan Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM, LTJ dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai industri, khususnya industri otomotif, industri elektronik, dan juga industri pertahanan. Bahkan sudah dilakukan kesepakatan penetapan mineral strategis di industri pertahanan di Indonesia untuk mendukung pertahanan negara. Kesepakatan ini dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian ESDM. Selain itu, menyangkut dengan

isu global dimana hampir seluruh negara tengah berlomba dalam penggunaan energi ramah lingkungan (*green energy*), kebutuhan LTJ menjadi isu strategis. Pentingnya mengetahui berapapun jumlah sumber daya LTJ yang tersedia, karena hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara penghasil utama LTJ (Tiongkok) yang saat ini memonopoli komoditas ini.

Menurut Direktur Utama PT Timah, Achmad Ardianto, dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, saat ini LTJ sedang banyak dibutuhkan dan dicari banyak negara. Beliau juga menduga bahwa teknologi untuk mengekstraksi LTJ pun tak butuh biaya besar. PSDMBP Badan Geologi telah melakukan kegiatan penyelidikan atau eksplorasi LTJ secara rutin sejak maraknya pencarian komoditas ini. Pengurangan pasokan dari Tiongkok sebagai penghasil LTJ utama dunia menyebabkan kelangkaan dan melambungnya harga LTJ. Untuk itu, tulisan ini akan menggambarkan potensi serta tantangan LTJ di Indonesia.

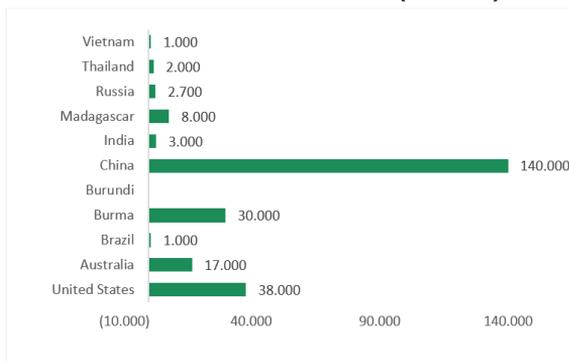
## Potensi LTJ

Di tingkat global, Tiongkok memproduksi 57,6 persen dari total produksi LTJ dunia, disusul dengan Amerika Serikat 15,6

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rosalina.tineke@gmail.com

persen, Burma 12,3 persen, dan Australia 7 persen (Gambar 1). Namun sejak tahun 2020, Tiongkok mulai membatasi dan menurunkan ekspor LTJ. Dampak atas kebijakan Tiongkok tersebut dirasakan oleh beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta negara-negara lainnya. Hal tersebut membuat pemerintah dalam negeri di masing-masing negara membuat strategi untuk tidak bergantung lagi terhadap Tiongkok. Selama beberapa dekade, pemenuhan kebutuhan LTJ Amerika Serikat sebagian besar berasal dari impor, terutama dari negara Tiongkok. Namun, Tiongkok justru menetapkan kebijakan pengurangan kuota ekspor komoditas LTJ. Sejak tahun 2005, Tiongkok secara bertahap mulai mengurangi kuota ekspor LTJ. Industri negara maju seperti Jepang dan Amerika memburu LTJ untuk bahan baku elektronik hingga pesawat tempur. Padahal di sisi lain, di Indonesia LTJ dianggap sebagai limbah dan tidak dimanfaatkan.

**Gambar 1. Produksi LTJ Dunia (Juta Ton)**



Sumber: USGS (2021)

Pada tahun 2017, kajian potensi mineral pertambangan timah yang dilakukan Kementerian ESDM menemukan volume endapan mengandung LTJ di Indonesia cukup besar. Badan Geologi Kementerian ESDM melakukan survei dan pemetaan potensi mineral LTJ di Indonesia. Hasilnya, terdapat 28 lokasi yang sudah teridentifikasi memiliki potensi LTJ. Potensi LTJ terbanyak yaitu Pulau Sumatra dengan 16 titik, kemudian Pulau Kalimantan sebanyak 7 titik, Pulau Sulawesi terdapat 3 titik,

dan terakhir 2 titik potensi terdapat di Pulau Jawa. Potensi sumber daya LTJ dengan tipe endapan laterit terdapat di Pulau Sumatera sebanyak 23 juta ton dan Pulau Sulawesi sebanyak 1,5 juta ton. Sedangkan potensi sumber daya LTJ dengan tipe *tailings* terdapat di Pulau Sumatera sebanyak 5 juta ton dan di Pulau Kalimantan sebanyak 7 juta ton.

Merespon kondisi pasar yang demikian bagusnya, berbagai negara berlomba menemukan potensi dan pengembangan LTJ seperti Kanada, Amerika Serikat, Jepang, maupun negara-negara lainnya, serta tidak ketinggalan juga Indonesia. Indonesia berpotensi sebagai lokasi pilihan bagi importir atau investor dari negara-negara kawasan Asia, khususnya Jepang dan Tiongkok, dalam mengembangkan komoditas LTJ.

Sampai saat ini, produksi LTJ di Indonesia belum dimaksimalkan dikarenakan sebagian besar LTJ Indonesia diproduksi sebagai produk sampingan dari pemegang komoditi seperti timah, tembaga, serta emas. PT Timah Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi LTJ. PT Timah baru-baru ini memulai *project* percontohan dalam memproses produk sampingan LTJ dari *tailing* timah. Dari *project* tersebut, PT Timah menghasilkan sekitar 50 kg LTJ per tahun. Untuk itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai LTJ, mulai dari sisi produksi, kemudian pengolahan, sisi lingkungan, hingga penerapannya lebih lanjut.

Walaupun dilihat nilai sisi ekonominya LTJ belum signifikan, namun prospek masa depan LTJ untuk mendukung pengembangan teknologi alternatif dan teknologi tinggi perlu diperhatikan dengan baik. Terlebih lagi terkait dengan pasir mineral tanah jarang sebagai sumber LTJ, dimana saat ini hanya menjadi sampah buangan pertambangan timah. Selain itu, belum diperhitungkan kandungan mineral LTJ dalam pemanfaatan pasir darat dan laut untuk bahan urug dari jalur timah. Jika melihat potensi LTJ, akan lebih menguntungkan jika Indonesia turut serta dalam proses pengembangannya.

## Tantangan LTJ

Upaya memaksimalkan potensi LTJ bukan hal yang mudah, mengingat terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. **Pertama**, sulitnya pemanfaatan LTJ di Indonesia akibat kurangnya teknologi yang digunakan untuk pemanfaatan LTJ ini. Sayangnya sampai saat ini, Tiongkok masih belum terbuka mengenai teknologi dalam pemanfaatan mineral LTJ ini. Sedangkan, jika melihat negara-negara lain belum semahir Tiongkok dalam pemanfaatan LTJ. Pemilihan teknologi harus terkait parameter kinerja produk dari hulu hingga hilir, ramah lingkungan, serta kualitas produk yang dihasilkan. **Kedua**, meski banyak wilayah di Indonesia yang memiliki indikasi sumber daya LTJ, namun dinilai belum ada kesiapan di wilayah ini. Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah dapat mengetahui berapa banyak cadangan yang terdapat di Indonesia. Sebelum merancang industri LTJ dengan skala yang sesuai, data sumber daya LTJ yang terukur atau cadangan LTJ dinilai sangat *urgent* didahulukan.

**Ketiga**, dari sisi regulasi. Regulasi pengembangan LTJ di Indonesia pada dasarnya mengikuti UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Selain itu, dikarenakan sebagian besar dari LTJ merupakan mineral radioaktif, sehingga hal tersebut juga diatur melalui UU tentang Ketenaganukliran. Hal ini mengakibatkan hingga saat ini, proses perizinan industri tersebut masih serumit produk komoditas mineral utama. Akibatnya, banyak unsur LTJ yang dibuang bersama limbah lainnya. Karena proses yang rumit inilah pengusaha pertambangan tidak tertarik dalam pengembangan ataupun pengolahan LTJ. **Keempat**, pemerintah perlu mewaspadaai bahwa akan banyak penambang ilegal yang akan melakukan penyeludupan LTJ atau pengiriman LTJ ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Di samping itu, yang juga akan menjadi permasalahan adalah terkait limbah dan dampak jangka panjang ke depannya. Produksi ilegal kerap dilakukan karena

biaya produksi yang lebih rendah sebab menghindari pajak dan mengabaikan standar lingkungan (tidak ada jaminan reklamasi) (Shen *et al.*, 2019). Pemerintah perlu mewaspadaai apabila terjadi penambangan LTJ skala besar akan berpotensi mengalami degradasi lingkungan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penting adanya regulasi industri untuk mencegah produksi tanpa izin tersebut.

## Rekomendasi

Apabila pemerintah berencana memaksimalkan potensi LTJ di Indonesia, maka ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. **Pertama**, diperlukan dukungan peran pemerintah dalam mempercepat pengadaan teknologi pengolahan monasit dan tahapan hilirisasi selanjutnya. **Kedua**, pemerintah perlu menyusun *roadmap* LTJ Indonesia mulai dari mengidentifikasi potensi LTJ, eksplorasi, ekstraksi, pengolahan dan hilirisasi LTJ dalam skala industri nasional.

**Ketiga**, walaupun LTJ ini diminati oleh Amerika dan Tiongkok, namun sebaiknya komoditas ini dimaksimalkan juga oleh Indonesia. Perlu persiapan *offtaker* dalam negeri untuk LTJ. **Keempat**, perlu dukungan pemerintah dari regulasi yang mengatur pengembangan LTJ, sehingga pengambilan atau ekstraksi unsur LTJ tidak rumit dan bernilai ekonomis bagi pengusaha dan investor kedepannya.

**Kelima**, untuk mendukung potensi LTJ, diperlukan adanya kerja sama yang baik, dukungan dan perlindungan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Yang terpenting adalah adanya kebijakan pemerintah yang melandasi penambangan LTJ, sehingga cadangan LTJ yang terdapat di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal.

## Daftar Pustaka

Bisnis, Ekonomi. 2022. *Cadangan Melimpah, Ini Sederet Manfaat LTJ*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210911/44/1441078/cadangan-melimpah-ini-sederet-manfaat-logam-tanah-jarang>. 21 April 2022.

CNBC Indonesia, 2022. *Jadi Logam Andalan Dunia, Ini Potensi Rare Earth di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190605092357-4-76794/jadi-logam-andalan-dunia-ini-potensi-rare-earth-di-indonesia>. 21 April 2022.

Detik, Finance. 2022. *Berapa Sih Harga Tanah Jarang Harta Karun RI yang Jadi Rebutan Dunia?*. Diakses dari <https://finance.detik.com/energi/d-6027676/berapa-sih-harga-tanah-jarang-harta-karun-ri-yang-jadi-rebutan-dunia>. 19 April 2022.

Katadata. 2022. *Peluang Pengembangan LTJ untuk Industri Pertahanan RI*. Diakses dari <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fbe4db4d47c9/peluang-pengembangan-logam-tanah-jarang-untuk-industri-pertahanan-ri>. 20 April 2022.

Katadata. 2022. *Cina Tutupi Teknologi, RI Kesulitan Olah LTJ*. Diakses dari <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/61b71e16d7a60/cina-tutupi-teknologi-ri-kesulitan-olah-logam-tanah-jarang>. 20 April 2022.

Ruangenergi. 2022. *Potensi Pemanfaatan LTJ di Indonesia*. Diakses dari <https://www.ruangenergi.com/potensi-pemanfaatan-logam-tanah-jarang-di-indonesia/>. 20 April 2022.

Shen, Y., Ruthann, M., Roderick, G.E. 2019. *China's public policies toward rare earths, 1975– 2018*. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/338434338\\_China's\\_public\\_policies\\_toward\\_rare\\_earths\\_1975-2018](https://www.researchgate.net/publication/338434338_China's_public_policies_toward_rare_earths_1975-2018). 22 April 2022.

USGS. 2021. *Rare Earths Statistics and Information*. Diakses dari <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-information>. 23 April 2022.

# Upaya dan Tantangan Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Rasio Kewirausahaan di Indonesia

Taufiq Hidayatullah\*)  
Marihot Nasution\*\*)

## Abstrak

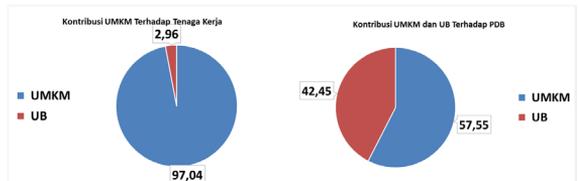
Pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,95 persen di tahun 2024. Namun sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, namun dalam perjalanannya, pemerintah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari rendahnya indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan Indonesia, belum adanya basis data UMKM yang terintegrasi, sampai dengan kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia.

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian nasional. Dalam teori kewirausahaan destruktif kreatif yang digagas oleh Joseph A. Schumpeter, wirausaha dipandang sebagai inovator utama dan kewirausahaan adalah pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui badai penghancuran kreatif (Schumpeter, 1947). Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan representasi dari kewirausahaan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun waktu 2010-2019, diketahui bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB rata-rata sebesar 57,55 persen. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja rata-rata sebesar 97,04 persen.

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh informasi bahwa wirausaha yang tercermin dari UMKM memberikan kontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan usaha besar (UB), baik dari segi PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Mengingat kontribusi yang diberikan oleh sektor kewirausahaan, pemerintah, melalui RPJMN 2020-2024, menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional dari 3,3 persen

(8,2 juta penduduk) di tahun 2019 menjadi 3,95 persen (9,7 juta penduduk) di tahun 2024. Peningkatan rasio kewirausahaan di Indonesia diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1. Rata-rata Kontribusi UMKM dan UB Terhadap PDB dan Tenaga Kerja Tahun 2010-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang salah satu tujuannya adalah menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (KemenkopUKM), sampai dengan saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah rasio

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: taufiqhidayatullah1990@gmail.com

\*\*\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

tersebut masih berada di bawah negara negara tetangga, seperti Singapura 8,76 persen, Thailand 4,2 persen, dan Malaysia sebesar 4,74 persen. Berkaca pada keadaan tersebut, artikel ini hendak menjabarkan beberapa contoh program yang telah dijalankan pemerintah dalam mencapai target rasio kewirausahaan di Indonesia beserta dengan tantangannya.

## Program Pemerintah Terkait Penciptaan Wirausaha Baru

### 1. Program Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan wirausahawan baru adalah program bantuan bagi wirausaha pemula. Program ini diinisiasi dan dilaksanakan oleh KemenkopUKM sejak tahun 2011. Program ini bertujuan untuk memberikan dana kepada wirausaha pemula untuk memperkuat modal awal usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan daerah perbatasan/tertinggal/terdepan/terluar, kawasan ekonomi khusus, dan daerah antarkelompok yang berpendapatan rendah/masyarakat miskin. Program ini juga diharapkan mampu memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan kehidupan yang berkelanjutan. Berdasarkan data KemenkopUKM, realisasi anggaran program bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula dari tahun 2011-2020 mencapai Rp283,35 miliar yang terdistribusikan kepada 23.751 orang.

**Gambar 2. Rekapitulasi Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Tahun 2011-2020**



Sumber: KemenkopUKM, 2011-2020

Berdasarkan Gambar 2, diperoleh informasi bahwa alokasi anggaran dan

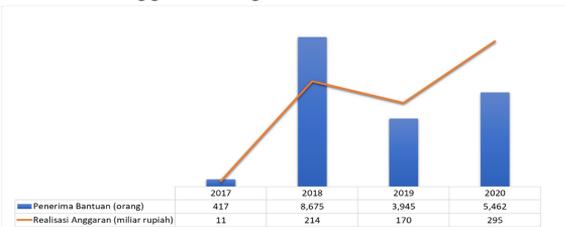
jumlah penerima bantuan untuk program bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula periode 2011-2015 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode 2016-2020. Pada periode 2011-2015, realisasi anggaran program tersebut sebesar Rp207,37 miliar untuk 17.095 orang, sedangkan pada periode 2017-2020, realisasi anggaran sebesar Rp79,98 miliar untuk 6.656 orang. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2016, program tersebut tidak dilaksanakan sehingga tidak ada bantuan yang dikeluarkan oleh KemenkopUKM. Jika dilihat berdasarkan sebaran penerima bantuan pada tahun 2020, 7,99 persen telah diberikan kepada orang yang berada di daerah tertinggal/terluar/terdepan, 7,09 persen untuk daerah kawasan ekonomi khusus, dan 77,84 persen untuk daerah antarkelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin.

### 2. Program Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2009 dan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP). LPMUKP memberikan akses permodalan dalam bentuk dana bergulir untuk mengembangkan modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP). Selain akses permodalan, program ini juga memiliki layanan pendampingan teknis dan manajerial kepada penerima pinjaman modal usaha kelautan dan perikanan. Dalam mendukung terciptanya wirausaha baru, salah satu ketentuan pelaku usaha yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah merupakan bagian dari pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru. Berdasarkan laporan kinerja BLU LPMUKP, realisasi anggaran program pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan tahun 2017-2020 mencapai Rp690 miliar yang terdistribusikan kepada 18.499 orang. Jika dilihat dari pola penyaluran, naik

turunnya realisasi anggaran program PMUKP didasarkan atas jumlah penerima manfaat yang selalu berubah tiap tahunnya.

Gambar 3. Rekapitulasi Jumlah Penerima Bantuan dan Realisasi Anggaran Program PMUKP Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2017-2020

### 3. Program-Program Lain yang Mendukung

Selain dua program yang telah dipaparkan di atas, upaya pemerintah dalam menciptakan wirausaha baru

sebenarnya telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir dengan berbagai program yang tersebar ke berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan bahwa program-program terkait pemberdayaan UMKM tersebar di 21 K/L dengan menggunakan dukungan anggaran dari APBN (Tabel 1).

### Tantangan dalam Penciptaan Wirausaha Baru

Berbagai program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, namun masih terdapat beberapa tantangan. **Pertama**, rendahnya indeks kesehatan

Tabel 1. Program-Program Terkait Pemberdayaan UMKM

No	Nama Program	Nama K/L	Anggaran (miliar rupiah)	Target Penerima	Unit Penerima
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kemenko Ekonomi	120,000.0	4,906,491	Debitur
2	Bantuan Wirausaha Pemula (Start Up Capital)	Kemenkop UKM	30.0	2,603	Individu
3	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	Kementerian Keuangan	3,000.0	979,729	Debitur
4	PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera)	Kementerian BUMN/PT. PNM Indonesia	20,190.0	6,043,840	Debitur
5	PNM ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro)	Kementerian BUMN/PT. PNM Indonesia	3,976.0	73,000	Individu
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	182.5	3,945	Individu
7	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	BKKBN	3.9	842,254	Keluarga
8	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kementerian Sosial	20,000.0	101,018	Kelompok
9	UMKM Go online/Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informasi	34.0	6,435,816	Unit Usaha
10	Program Pendampingan Export Coaching Program/ Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	Kementerian Perdagangan	161.8	810	Peserta
11	Inovasi Desa - Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL)	Kementerian Desa dan PDT	50.0	117	Desa
12	Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat/ Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.0	3,350	Individu
13	Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)	Kementerian Pemuda dan Olahraga	17.2	1,034	Individu
14	Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya/Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.8	2,165	Keluarga
15	Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri/Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Kementerian Tenaga Kerja	58.1	16,600	Individu
16	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM)	14.7	27,702	Unit Usaha
17	Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	211.7	72,000	Individu
18	Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT)	Kemenkop UKM	96.0	N/A	Debitur
19	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/ Jasa Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.1	1,875	Produk
20	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK)	Bank Indonesia (BI)	179.6	1,299	Individu
21	Industri Rumahan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.4	3,764	Perempuan

Sumber: TNP2K (2021)

ekosistem kewirausahaan Indonesia. Indeks kesehatan ekosistem kewirausahaan adalah index yang digunakan *The Global Entrepreneurship and Development Institute* (GEDI) untuk menilai ekosistem kesehatan kewirausahaan di 137 negara dengan menggunakan tiga indikator, yaitu aspirasi kewirausahaan, kemampuan wirausaha, dan sikap kewirausahaan. Berdasarkan index tersebut, pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke 75 dari 137 negara di dunia dengan skor 26,0. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih tertinggal dari Singapura (posisi 27), Malaysia (posisi 43), Brunei Darussalam (posisi 48), Thailand (posisi 54), dan Vietnam (posisi 73). Kelemahan ekosistem kewirausahaan di Indonesia, berdasarkan laporan GEDI, terletak pada aspek aspirasi kewirausahaan yang terdiri dari pengembangan strategi inovasi, pengembangan produk, dan upaya perluasan pasar.

**Kedua**, belum memiliki basis data UMKM yang terintegrasi. Keberhasilan dan efektivitas program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai program dan beberapa K/L sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terintegrasi. Sampai dengan saat ini, pengelolaan basis data UMKM masih dilakukan oleh masing-masing K/L serta terdapat data yang terduplikasi. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada kurang efektifnya berbagai program yang telah dilaksanakan. Hasil kajian TNP2K dan Lembaga Demografi UI mengungkapkan bahwa dengan tidak adanya basis data terintegrasi program UMKM tersebut akan menjadi masalah ketika pemerintah berencana untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM di masa pandemi Covid-19 dan kemudian menjadi penyebab kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan. Selain itu, tidak adanya basis data terintegrasi juga dapat menyulitkan pemerintah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi guna perbaikan program di masa mendatang.

**Ketiga**, kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Jawa Timur, Adik Dwi Putratno, menyatakan terdapat beberapa kendala dalam menciptakan wirausaha baru, salah satunya adalah kurangnya dukungan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada lulusan SMK dan perguruan tinggi, padahal seharusnya lulusan SMK dan perguruan tinggi diciptakan untuk menjadi wirausaha. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas. Anwar Abbas menyampaikan bahwa harus ada perubahan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, pasalnya dunia pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu mencetak lulusan yang menciptakan lapangan pekerjaan, namun hanya menciptakan lulusan yang mencari kerja. Di sisi lain, berdasarkan laporan Lembaga Riset SMERU, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah pengusaha di Indonesia adalah kurangnya individu yang berketerampilan tinggi. Berdasarkan laporan tersebut, juga diketahui bahwa hanya 0,5 per 100 individu berusia 15 tahun yang memiliki keterampilan sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena kurikulum pendidikan di Indonesia yang hanya fokus pada keterampilan teknis saja, seperti membaca, menghafal, dan berhitung, tanpa membiasakan setiap individu berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada.

## Rekomendasi

Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia patut mendapatkan apresiasi, namun masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan pemerintah agar rasio kewirausahaan di Indonesia dapat lebih optimal. **Pertama**, meningkatkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia,

khususnya terkait dengan pengembangan produk, pengembangan strategi inovasi, dan perluasan akses pasar. Pengembangan produk dan pengembangan strategi inovasi dapat dilakukan pemerintah dengan memperkuat dan memperbanyak program pendidikan serta pelatihan kepada calon wirausaha. Sedangkan perluasan akses pasar dapat pemerintah lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk jangkauan yang lebih luas.

**Kedua**, membuat satu basis data UMKM yang terintegrasi, sehingga program-program yang ada antar-K/L tidak beririsan dan dapat memudahkan pemerintah dalam menyusun perencanaan pengembangan UMKM dan kewirausahaan di masa depan. **Ketiga**, memasukan pelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum pembelajaran sejak pendidikan dasar dengan harapan anak-anak mendapatkan bekal ilmu kewirausahaan dan motivasi untuk menjadi wirausahawan. Pemberian pendidikan kewirausahaan sejak dini juga diharapkan dapat menjadikan anak-anak berfikir lebih kritis, analitis, dan kreatif.

## Daftar Pustaka

Katadata. 2019. *Minim Ketrampilan, Indonesia Sulit Cetak Pengusaha*. Diakses dari <https://www.katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6b4b710/minim-keterampilan-indonesia-sulit-cetak-pengusaha>. 20 April 2022

Kementerian Koperasi dan UKM. 2022. *Tingkatkan Rasio Kewirausahaan, KemenkopUKM siapkan Berbagai Program Strategis*. Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id/read/tingkatkan-rasio-kewirausahaan-kemenkopukm-siapkan-berbagai-program-strategis>. 22 April 2022.

Kementerian Koperasi dan UKM. *LAKIP Deputi Bidang Pembiayaan KemenkopUKM Tahun 2011-2020*.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2021. *Kewirausahaan UMKM*

*dan Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses dari [https://www.setneg.go.id/baca/index/kewirausahaan\\_umkm\\_dan\\_pertumbuhan\\_ekonomi](https://www.setneg.go.id/baca/index/kewirausahaan_umkm_dan_pertumbuhan_ekonomi), tanggal 20 April 2022.

Laporan Kinerja BLU LPMUKP Tahun 2017-2020.

The Global Entrepreneurship and Development Institute. 2019. *Global Entrepreneurship Index 2019*. Diakses dari [https://thegedi.org/wp-content/uploads/2020/01/GEI\\_2019\\_Final-1.pdf](https://thegedi.org/wp-content/uploads/2020/01/GEI_2019_Final-1.pdf). 20 April 2022.

Okezone.com. 2022. *Muhammadiyah: Sekolah itu Harus Cetak Pengusaha Bukan Pencari Kerja*. diakses dari <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/22/623/2565589/muhammadiyah-sekolah-itu-harus-cetak-pengusaha-bukan-pencari-kerjaan>. 21 April 2022.

Sindonews.com. 2021. *Pendiri HIPMI Prihatin Rendahnya Jumlah Wirausahawan di Indonesia*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/577916/704/pendiri-hipmi-prihatin-rendahnya-jumlah-wirausahawan-di-indonesia-1635045012>. 21 April 2022.

Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2021. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. 20 April 2022.

# Target Pemerintah Menurunkan Tingkat Kemiskinan pada 2022

Mujiburrahman<sup>\*)</sup>  
Rendy Alvaro<sup>\*\*)</sup>

## Abstrak

Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 1,21-0,71 percentage point (pp). Data yang dirilis oleh BPS sejak 2015 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan mengalami perlambatan penurunan (hanya sebesar 0,48 pp), atau 50 persen lebih lambat dibanding periode 2007-2014. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai penurunan tertinggi sebesar 0,58 pp pada 2017. Pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada tahun depan dengan mempertimbangkan data dan kebijakan, serta faktor eksternal yang penuh dengan ketidakpastian.

Isu kemiskinan telah menjadi perhatian dunia internasional selama dua dekade terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprioritaskan pengentasan kemiskinan dunia melalui agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 dan dilanjutkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menargetkan pengentasan kemiskinan di semua bentuk pada 2030. Demikian juga Indonesia terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada pada level 26,5 juta jiwa (BPS, 2022).

Di tengah bayangan risiko ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah merilis rencana pengurangan jumlah penduduk miskin hingga *single digit* menjadi 8,5-9 persen pada 2022. Di dalam dokumen Nota Keuangan (NK) APBN 2022, pemerintah menyatakan akan meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan meneruskan program *pro-poor* untuk mengembalikan tren penurunan kemiskinan seperti pada tahun sebelumnya melalui penyempurnaan program-program perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan melanjutkan bantuan sosial melalui

Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM, Program Kartu Sembako (BPNT) untuk 18,8 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,2 juta siswa dan 650,6 ribu mahasiswa, serta Bantuan Iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa. Sedangkan bantuan sosial melalui non-K/L digunakan untuk beberapa program, misalnya Program Subsidi Listrik kepada 37,9 juta pelanggan, Program Subsidi LPG 3 Kg, Program Kartu Prakerja, Program Subsidi Bunga KUR, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain itu, dukungan program perlindungan sosial diberikan melalui transfer ke daerah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan (NK APBN 2022).

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan selalu mengedepankan pendekatan bantuan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin yang sifatnya *ad hoc* (sementara). Namun faktanya, bahwa kebijakan perlindungan sosial saja belum sepenuhnya mampu mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan secara signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini ingin mencoba memberi catatan atas target pemerintah menurunkan tingkat

<sup>\*)</sup> Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: mujiburrahman8588@gmail.com

<sup>\*\*)</sup> Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com

kemiskinan pada 2022.

### Tingkat Kemiskinan Mengalami Perlambatan Penurunan Sejak 2013

Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020 mengalami lonjakan hingga mencapai 10,19 persen akibat pandemi Covid-19 (Gambar 1). Jumlah tersebut naik dari 24,785 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 27,549 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2022). Seiring dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19 dan mulai bergairah kembali aktivitas perekonomian domestik, pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan kembali di bawah *double digit*, atau sebesar 9,71 persen. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2,763 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa.

Setelah sukses pada tahun 2021, pemerintah terlihat sangat berambisi menurunkan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan pada interval 8,5-9 persen pada tahun 2022. Jika dikalkulasi, maka ambisi dan keyakinan pemerintah akan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan antara 1,21-0,71 pp pada 2022. Menurut Kepala Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, target yang ditetapkan pemerintah akan berat untuk dapat diwujudkan (Bisnis Indonesia, 2022). Dibutuhkan usaha-usaha yang *extraordinary* dengan pendekatan multisektoral. Data dan fakta menunjukkan bahwa sejak 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia tidak pernah turun melebihi 0,71-1 pp. Selama periode 2015-2021, tingkat kemiskinan turun rata-rata hanya sebesar 0,48 pp. Hanya pada tahun 2017, penurunan tingkat kemiskinan mencapai

Gambar 1. Perkembangan Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2021



Sumber: BPS, diolah (2022)

0,58 pp. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi normal tanpa pandemi saja pemerintah sangat sulit menurunkan tingkat kemiskinan di atas 0,6 pp. Apalagi kemudian jika situasi dan kondisi negara belum pulih dari pandemi Covid-19, sehingga pemerintah perlu berhitung lebih realistis lagi agar target penurunan kemiskinan dapat dicapai.

### Program Pengentasan Kemiskinan Relatif Tidak Berbeda dengan Tahun 2021

Pemerintah berupaya serius mencapai sasaran penurunan kemiskinan pada tahun 2022. Ini terlihat dari intervensi anggaran melalui program perlindungan sosial yang meningkat pada tahun 2022. Jika dilihat lebih jauh, anggaran perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 meningkat sebesar 17,27 persen, atau naik dari Rp367,9 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp431,5 triliun pada tahun 2022. Jika dilihat dari sisi program, tidak banyak program perlindungan sosial yang berubah dalam rencana pengentasan kemiskinan pada tahun 2022. Pemerintah masih fokus pada PIP, Program Bidikmisi/ KIP Kuliah, PKH, BPNT, dan PBI JKN/KIS. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan program subsidi, dana cadangan penanggulangan bencana, dan Kartu Prakerja. Hanya ada tambahan program pada tahun 2022, yaitu Jaminan Persalinan dengan anggaran sebesar Rp800 miliar dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp973 miliar. Kenaikan anggaran yang relatif lebih besar pada program non-K/L berupa cadangan perluasan perlindungan sosial sebesar Rp42,2 triliun dan program subsidi sebesar Rp30,6 triliun. Sedangkan program melalui transfer daerah melalui BLT Dana Desa tidak berubah sama sekali.

Berdasarkan Tabel 1, anggaran program PIP naik tidak terlalu signifikan, atau hanya Rp 2 miliar. Sedangkan anggaran program KIP Kuliah dan PBI JKN/KIS justru berkurang masing-masing sebesar Rp481 miliar dan Rp2,32 triliun. Kenaikan

anggaran yang besar justru pada program subsidi dan dana cadangan perluasan perlinsos. Fakta empiris menunjukkan bahwa kenaikan anggaran perlindungan sosial sebesar 35,63 persen pada tahun 2018 hanya dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,46 persen. Maka, dapat dipastikan bahwa kenaikan alokasi anggaran perlindungan sosial di bawah 20 persen pada tahun 2022 tidak akan mampu mendorong penurunan kemiskinan sesuai dengan ekspektasi pemerintah.

### Kenaikan Harga Pangan Dapat Menekan Target Penurunan Kemiskinan

Di tengah upaya pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun relatif cukup signifikan, harga pangan dunia meningkat pada triwulan pertama 2022. Menurut BPS (2015), salah satu faktor meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah akibat kenaikan harga pangan. Kontribusi makanan terhadap meningkatnya garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan bukan makanan seperti perumahan, sandang dan papan.

**Tabel 1. Perbandingan Alokasi Anggaran Program Perlindungan Sosial 2021 dan 2022 (Miliar Rupiah)**

Program	Tahun	
	2021	2022
Melalui Belanja K/L		
Program Indonesia Pintar	11112	11114
Bidikmisi/KIP Kuliah	10169	9688
Program Keluarga Harapan	28709	28709
Program Kartu Sembako (BPNT)	45120	45120
PBI Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	48787	46464
Penanggulangan Bencana Alam	250	250
Jaminan Persalinan		800
Bansos Tunai	12000	
Bansos Lainnya		340.8
Melalui Non K/L		
Subsidi	163603	194227
Dana Cadangan Penanggulangan Bencana	5000	5000
Kartu Prakerja	10000	11000
Jaminan Kehilangan Pekerjaan		973
Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas III JKN	2400	2400
Cadangan IJP UMKM		4417
Cadangan Perluasan Perlinsos		42158
Cadangan Perlinsos		26.2
Cadangan Pendidikan		14
Cadangan Subsidi KUR		2
Melalui Transfer ke Daerah		
BLT Dana Desa	28000	28000

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2022)

Menurut data yang dirilis oleh FAO (April 2022) menunjukkan bahwa indeks harga pangan dunia mencapai level tertinggi sejak 1990 pada level 159,3 per Maret 2022. Harga pangan dunia telah melonjak 33,6 persen *year on year (yoy)*. Lima komoditas pangan mengalami kenaikan *yoy*, yaitu minyak nabati naik 56,05 persen, serealnaik naik 37,3 persen, susu dan produk olahannya naik 23,6 persen, gula naik 22,57 persen, serta daging naik 19,04 persen (Katadata, 2022).

Meskipun masih cukup terkendali, harga pangan di Indonesia relatif tinggi. Hal ini tercermin dari inflasi makanan, minuman, dan tembakau mencapai 3,59 persen per Maret 2022. Kenaikan inflasi pangan tersebut sudah berada di atas inflasi umum sebesar 2,64 persen. Jika pemerintah gagal mengendalikan kenaikan harga pangan yang merupakan sumber kebutuhan utama kelompok miskin dan rentan, maka dapat dipastikan bahwa target penurunan tingkat kemiskinan pada 2022 jauh panggang dari api.

### Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Perlambat Turunkan Tingkat Kemiskinan

Intervensi pemerintah terhadap penurunan kemiskinan melalui pendekatan anggaran perlindungan sosial belum sepenuhnya menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, dibutuhkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi berkualitas agar target dan sasaran pengurangan kemiskinan tercapai dengan maksimal. Namun, di tahun ketiga pascapandemi Covid-19, pemerintah masih menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen. Melihat data lebih jauh, tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah pada 2022 belum cukup menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari 0,71 persen.

Diperkirakan rerata penurunan tingkat kemiskinan pada periode 2007-2014 sebesar minus 0,80 pp. Sedangkan pada periode 2014-2021, secara rerata kemiskinan menurun sebesar minus 0.48 pp. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi percepatan penurunan kemiskinan

hampir 50 persen lebih cepat pada periode dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas enam persen. Dengan demikian, sangat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel dan memainkan peran sentral dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

### **Pemerintah Tidak Pertimbangkan Dampak Geopolitik Global?**

Perkembangan geopolitik dunia akibat perang Rusia-Ukraina, konflik Laut China Selatan, dan konflik Timur Tengah lainnya seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan target dari suatu kebijakan, termasuk penurunan kemiskinan. Secara teori, kondisi eksternal tersebut tidak secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun hal ini ditransmisikan melalui kenaikan harga-harga pangan dunia, dimana Indonesia masih sangat tergantung pada pasar internasional (impor).

Konflik Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda kapan berakhir telah menyebabkan dampak negatif terhadap harga-harga kebutuhan pokok domestik. Menurut data BPS (2022), Ukraina pemasok 2,96 juta ton (27 persen) gandum ke Indonesia. Kenaikan harga gandum akan berdampak pada produk pangan, seperti mie instan yang umumnya dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jika perang Rusia-Ukraina terus berlanjut, maka akan berdampak serius pada kehidupan penduduk miskin dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah tetap harus mempertimbangkan faktor eksternal dalam menetapkan target kebijakan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan analisis di atas, maka, **pertama**, pemerintah harus lebih realistis dalam menentukan dan menghitung rencana penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2023.

**Kedua**, pemerintah harus memperbaiki kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi yang tentu akan tercermin pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan. **Ketiga**, intervensi anggaran melalui program perlindungan sosial belum sepenuhnya mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Dibutuhkan strategi penanganan kemiskinan jangka panjang di luar pendekatan program perlindungan sosial yang dapat menjamin penciptaan lapangan kerja atau pemberdayaan penduduk miskin untuk berwirausaha. **Keempat**, pemerintah harus mempertimbangkan faktor eksternal (geopolitik global) dalam menetapkan target pengurangan kemiskinan, karena gejolak geopolitik global secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap harga bahan baku pangan di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

Bisnis Indonesia. 2021. *Pemerintah Targetkan Kemiskinan Turun 8,5-9 Persen di 2022, TNP2K: Sangat Ambisius*. Dakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210819/9/1431609/pemerintah-targetkan-kemiskinan-turun-85-persen-90-persen-di-2022-tnp2k-sangat-ambisius> pada tanggal 20 April 2022.

Katadata.co.id. 2022. *Waspada Harga Pangan Dunia Sudah Naik 33,6 Persen YoY Per Maret 2022*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/waspada-harga-pangan-dunia-sudah-naik-336-yoy-per-maret-2022> pada tanggal 27 April 2022.

Kementerian Keuangan. 2022. *Anggaran Perlindungan Sosial 2013-2022*. Diakses dari <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016> pada tanggal 15 April 2022.

Kementerian Keuangan. 2022. *Nota Keuangan APBN 2022*.

United Nations. 2022. *Sustainable Development Goals*. Diakses dari <https://sdgs.un.org/goals/goal1> pada tanggal 25 April 2022.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**Pusat Kajian Anggaran**  
**Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

